



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
KE PROVINSI SUMATERA BARAT  
10-14 APRIL 2021**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2021**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021**  
**KE PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**10-14 APRIL 20201**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 Januari 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 Maret 2021.
4. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI tanggal 31 Maret 2021 mengenai Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup

dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat adalah untuk:

1. Melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait:
  - a. permasalahan budi daya dan ancaman kepunahan ikan bilih sebagai spesies endemik di Danau Singkarak, Provinsi Sumatera Barat;
  - b. permasalahan pencemaran lingkungan Danau Singkarak, Provinsi Sumatera Barat;
  - c. permasalahan penelitian, pengembangan dan inovasi tanaman buah tropika di Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika Aripin, di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
  - d. ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan jelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) Tahun 2021 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  - e. permasalahan ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; serta
  - f. permasalahan pembangunan insinerator di TPA Aie Dingin, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. Menyerap aspirasi para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

## **II. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

### **III. PELAKSANAAN**

#### **A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 10-14 April 2020 dan bertempat di Solok dan Kota Padang.

#### **B. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Provinsi Sumatera Barat**

Sumatera Barat (disingkat Sumbar) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Pada tahun 2020, provinsi ini memiliki penduduk sebanyak 5.534.472 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km<sup>2</sup>. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudra Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 °C sampai 31,5 °C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur

Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Selain Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km<sup>2</sup>, Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau Di atas dan Danau Dibawah).

Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batubara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir dan hasil perikanan.

Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Daerah pesisir pantai, terutama kawasan kepulauan, menghasilkan banyak kepala. Di daerah perbukitan dan pegunungan terdapat perkebunan karet, cengkih, dan lada. Kawasan pegunungan yang ditutupi hutan menghasilkan kayu. Medan yang berat karena banyaknya lereng perbukitan yang curam merupakan tantangan utama pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini.

## **2. Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten Solok adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Barih Solok.

Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 00° 32' 14" dan 01° 46'45" Lintang Selatan dan 100° 25' 00" dan 101° 41' 41" Bujur Timur. Topografi wilayahnya sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit, dengan ketinggian antara 329 meter – 1.458 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Solok disamping memiliki banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Di antara danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau di Atas dan Danau di Bawah), serta Danau Talang. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi, yaitu Gunung Talang. Dilihat dari letaknya, posisi Kabupaten Solok sangat strategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatra, daerahnya juga berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibu kota Provinsi Sumatera Barat.

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2010 sebagian besar (38.88%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 15.99% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.37%, dan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan 2.18%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2010 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Kecamatan Bukit Sundi. Kecamatan-kecamatan lain luas areal sawahnya masih di bawah angka 3000 Ha.

Kabupaten Solok sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat perlu terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Hal ini berkaitan dengan ancaman mutasi lahan sawah yang semakin besar pada masa-masa mendatang. Kalau diamati untuk produksi padi pada tahun 2010, terjadi peningkatan produksi sebesar 4.86 persen dari 304.124.4 ton tahun 2009 menjadi 319.667.8 ton tahun 2010. Akan tetapi peningkatan ini perlu terus didorong untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan terutama beras dari waktu ke waktu.

Untuk tanaman palawija terjadi peningkatan produksi yang signifikan pada tahun 2010 terutama pada komoditas kedelai yaitu dari 108.3 pada Tahun 2009 naik menjadi 168.9 pada Tahun 2010. Kenaikan juga terjadi pada komoditas jagung, kacang tanah dan kacang hijau serta hampir semua komoditas palawija naik pada Tahun 2010.

### 3. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan ibu kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 693,66 km<sup>2</sup>, yang mana lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa.

Sentra perniagaan kota berada di Pasar Raya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi, termasuk tiga universitas negeri. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Sitti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor kepariwisataan. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau serta masakan khas mereka yang dikenal sebagai masakan Padang.

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatra, dengan luas keseluruhan 694,96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatra Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km<sup>2</sup> wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatra. Selain itu, terdapat pula 19 buah pulau kecil, di antaranya yaitu Pulau Sikuai dengan luas 4,4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan.

Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23°C-32°C pada siang hari dan 22°C-28°C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%-81%. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai

besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.

#### **4. Danau Singkarak**

Danau Singkarak adalah sebuah danau yang membentang di dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar.

Danau ini memiliki luas 107,8 km<sup>2</sup> dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatra setelah Danau Toba di Sumatra Utara. Danau ini merupakan hulu dari sungai atau Batang Ombilin. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatra. Danau ini adalah bagian dari Cekungan Singkarak-Solok yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatra. Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan Sesar Sumatra. Cekungan besar ini terbedung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau singkarak di satu bagian Cekungan Singkarak-Solok. Berbeda dengan Danau Maninjau yang terbentuk akibat letusan gunung api, Danau Singkarak terbentuk utamanya karena proses tektonik.

Letak dari Danau Singkarak berada pada koordinat 0,36 derajat Lintang Selatan (LS) dan 100,3 Bujur Timur (BT) dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut (mdpl). Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektare dengan panjang maksimum 20 kilometer dan lebar 6,5 kilometer dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 kilometer dengan curah hujan 82 hingga 252 milimeter per bulan.

Ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) merupakan spesies ikan yang diperkirakan hanya hidup di danau ini, dan menjadi salah satu makanan khas. Penelitian para ahli mengungkapkan 19 spesies ikan perairan air tawar hidup di habitat Danau Singkarak, Kabupaten Solok dan Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan ketersediaan bahan makanannya yang terbatas.

#### **IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

##### **A. KUNJUNGAN KE DANAU SINGKARAK**

###### **1. Permasalahan Budi Daya dan Ancaman Kepunahan Ikan Bilih sebagai Spesies Endemik Danau Singkarak**

Ikan bilih merupakan ikan endemik yang hanya ditemukan dan menjadi populasi ikan yang terbesar di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ikan dengan nama latin *mystacoleuseus padangensis* memiliki ukuran sedikit lebih besar dari ikan teri, berbentuk lonjong dan pipih dengan panjang 6-12 centimeter. Dengan harga yang menarik, ikan bilih menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar danau. Bahkan, ikan itu sempat menjadi komoditas ekspor dan dijual ke luar negeri.

Saat ini ikan bilih terancam punah dari danau kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa penyebab terancam punahnya ikan bilih dipicu oleh alat dan cara tangkap yang digunakan masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Nelayan menggunakan berbagai jaring untuk menangkap ikan bilih sesuai dengan lokasi penangkapannya, seperti jaring panjang, jaring lingkaran, sistem alahan, jala lempar, lukah, dan bahkan menggunakan setrum listrik yang mematikan semua ikan yang ada.

Jaring-jaring apung tidak pernah kosong terbentang di permukaan danau begitu pula dengan jala lempar yang ditebar masyarakat setiap harinya. Jenis alat tangkap yang digunakan pun berbeda-beda, ada nelayan yang menggunakan alat tangkap berupa jaring panjang, jaring lingkaran, sistem alahan, jala, lukah, dan menggunakan arus listrik (setrum). Bahkan jaring dan jala yang dipasang ukurannya sangat rapat sekitar 1-1,5 centimeter. Ukuran yang sangat rapat menyebabkan terjaringnya semua jenis ikan, termasuk anakannya dalam jumlah banyak. Karena semua ikan, termasuk anakannya tertangkap, maka ikan bilih sulit melakukan regenerasi dan reproduksi. Padahal ikan itu memijah di usia 6 bulan (dewasa). Ikan bilih memijah dengan cara menyongsong aliran air

sungai dan bertelur disela-sela batu. Setelah 20 jam larva telur akan menjadi anakan dan kembali masuk ke danau untuk menjadi dewasa.

Tidak hanya karena penangkapan, kelestarian ikan bilih terancam akibat aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Singkarak. Danau dijadikan tempat membuang berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian, limbah domestik dari perumahan dan aktivitas pasar. Jika hal ini dibiarkan berlanjut maka beban pencemaran ekosistem Danau Singkarak semakin berat dan pada akhirnya akan merugikan semua pihak, termasuk kelestarian biota danau, khususnya ikan bilih.

Aspirasi Pembudi daya Ikan Bilih di Danau Singkarak:

- a. Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati pada ekosistem Danau Singkarak, terutama terhadap spesies endemik, yaitu ikan bilih.
- b. Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan upaya pengaturan dalam penangkapan ikan di Danau Singkarak, terkait alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan, disamping pengaturan budi daya perikanan, berupa pembatasan kuota/izin budi daya ikan di Danau Singkarak.
- c. Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan adanya kebijakan Pemerintah, baik pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun Pemerintah Daerah dalam upaya penelitian dan pengembangan ikan bilih sebagai spesies ikan endemik di Danau Singkarak yang saat ini sudah terancam kepunahannya.
- d. Nelayan di Danau Singkarak mengharapkan adanya alternatif usaha perikanan atau usaha lainnya untuk menghentikan penangkapan ikan bilih dalam rangka menjaga kelestarian ikan bilih sebagai spesies endemik yang saat ini hampir punah.

## **2. Permasalahan Pencemaran Lingkungan Danau Singkarak**

Selain kegiatan penangkapan dan budi daya perikanan, keberadaan PLTA Singkarak disinyalir juga mempengaruhi kualitas ekosistem Danau Singkarak karena operasionalnya mengakibatkan fluktuasi air (elevasi danau).

Pada musim hujan, perusahaan melakukan penabungan air akibatnya ratusan hektar lahan pertanian dan lahan (kolam tangkap ikan) digenangi air. Abrasi dan

pengikisan tanah di sepanjang bibir danau tak terelakkan. Sementara, di waktu kemarau, perusahaan menguras air danau sampai ke tingkat kritis.

Beroperasinya PLTA Singkarak di Nagari Guguk Malalo telah mengakibatkan terjadinya perubahan sirkulasi air danau. Perubahan ini memicu naiknya belerang dari dasar danau (bangai) sehingga membuat ikan-ikan mati keracunan serta punahnya beberapa jenis biota danau.

Diperoleh informasi dari masyarakat di sekitar Danau Singkarak bahwa hampir semua jenis ikan endemik dan biota danau Singkarak terbawa arus air terowongan PLTA ke Nagari Asam Pulau, Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa jenis ikan yang telah punah di Perairan Nagari Malalo dan Sumpur diantaranya ikan puyu, rinuak, satuak, mingkai dan kulari. Sedangkan jenis ikan yang sulit ditemui yaitu ikan garing, asang, tilam, baung, turiak, kalai, buntal, kiung. Sementara jenis ikan terancam punah yaitu bilih dan barau. Sedangkan fauna danau yang punah diantaranya labi-labi, ular air dan tuai, termasuk tumbuhan danau seperti jariamun sago yang biasa hidup pada kedalaman 5-20 meter di dasar danau.

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan sepuluh danau prioritas penanganan karena ancaman kerusakan, salah satunya Danau Singkarak. Bentuk penanganan tersebut diantaranya melakukan pengelolaan ekosistem danau, pemanfaatan sumber daya air danau, pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan informasi danau, penyiapan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap danau, pengembangan kapasitas, kelembagaan dan koordinasi, peningkatan peran masyarakat.

Selanjutnya dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti ketujuh program tersebut. Pengelolaan Danau Singkarak mesti mempertahankan keberlanjutan lingkungan, pelestarian dan pemulihan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Guna mengatasi kepunahan ikan bilih, Pemerintah harus menetapkan lokasi-lokasi tempat pemijahan yang harus dijaga bersama masyarakat. Selain itu juga harus dibuatkan zonasi-zonasi pemanfaatan danau, kawasan tangkapan terbatas, agar populasi ikan dapat meningkat.

Selain itu perlu dibuat peraturan pendukung seperti kesepakatan antarnagari untuk menjaga kelestarian ekosistem Danau Singkarak dan khususnya pelestarian ikan bilih.

Selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi terkait penggunaan alat tangkap yang mendukung kelestarian ekosistem danau. Terutama bagi masyarakat nagari Padang Laweh Malalo, Muaro Pingai, Guguak Malalo, Sumpur, Batu Taba, Simawang, III Koto di Kabupaten Tanah Datar; Nagari Panningahan, Saniang Bakar, Kacang, Tikalak, Singkarak dan Sumani di Kabupaten Solok.

Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait permasalahan pencemaran lingkungan Danau Singkarak diantaranya adalah:

- a. Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan adanya upaya dari Pemerintah terkait penanganan sampah dan limbah yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada ekosistem Danau Singkarak.
- b. Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan adanya upaya dari Pemerintah untuk melakukan pengaturan atas pemberian izin usaha di Danau Singkarak dan sekitarnya bagi para pengusaha, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem Danau Singkarak.

#### **Rekomendasi:**

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati pada ekosistem Danau Singkarak, terutama terhadap spesies endemik, diantaranya ikan bilih.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ikan bilih sebagai spesies ikan endemik di Danau Singkarak yang saat ini sudah terancam kepunahannya.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengaturan atas pemberian izin usaha perikanan, baik perikanan

tangkap maupun perikanan budi daya bagi pengusaha dan masyarakat di Danau Singkarak dan sekitarnya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem Danau Singkarak.

4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan alternatif usaha bagi nelayan di Danau Singkarak sehingga dapat menghentikan penangkapan ikan bilih dalam rangka menjaga kelestarian ikan bilih sebagai spesies endemik yang saat ini hampir punah.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penanganan sampah dan limbah yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada ekosistem Danau Singkarak.

## **B. KUNJUNGAN KE BALAI PENELITIAN BUAH (BALITBU) TROPIKA ARIPAN DI KOTA SOLOK, PROVINSI SUMSTERA BARAT**

### **1. Program Pengembangan Hortikultura Unggulan**

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sektor pertanian sangat besar, sejauh ini Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat didominasi oleh hasil pertanian. Hasil pertanian Sumatera Barat telah menghasilkan berbagai komoditas yang mampu masuk ke berbagai pasar internasional. Pada tahun 2020 Sumatera Barat mampu mengekspor Manggis 500 ton ke Cina, dan ekspor Jenkol ke Jepang kemudian memiliki ekspor tanaman hias hingga mencapai nilai kurng lebih 2,1 triliun selama 2 tahun terakhir.

Dalam hal pengembangan komoditas hortikultura, baik di Sumatera Barat maupun di tingkat Nasional, Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika diharapkan mampu mengambil peran besar.

Balitbu Tropika merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (Puslitbang Hortikultura), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman buah tropika; pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman

buah tropika; pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman buah tropika; pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman buah tropika; pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman buah tropika; pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman buah tropika; pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman buah tropika; pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman buah tropika; penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman buah tropika; dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan Balitbu Tropika.

Sejauh ini Balitbu memiliki komoditas prioritas komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan melibatkan banyak pelaku (petani) serta menjadi prioritas nasional yaitu pisang, mangga, manggis, durian dan salak. Kemudian komoditas potensial yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi, diantaranya; papaya, alpukat, melon, sirsak, nanas, naga, dan semangka.

Kemudian Balitbu memiliki kebun percobaan di beberapa tempat seperti di KP. Aripan, KP. Sumani, KP. Cukur Gondang, KP. Kraton, dan KP. Pandean.

Produksi & Distribusi benih UPBS 2015-2019						
No.	Komoditas	Produksi Benih Sumber (Tahun)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Durian	2340	2198	-	8608	3724
2.	Alpukat	1000	1600	-	2932	2743
3.	Manggis	1600	782	-	3000	2383
4.	Sirsak	590	499	-	-	514
5.	Mangga	1897	1188	-	9000	3500
6.	Salak	-	-	-	50	453
7.	Pisang	50	-	-	-	-

**PRODUKSI TOTAL 53199 benih**

No.	Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Durian	3242	2198	-	5483	7567
2.	Alpukat	975	1600	-	395	3023
3.	Manggis	1352	782	-	-	1888
4.	Sirsak	661	499	-	-	32
5.	Mangga	4325	1188	-	8480	371
6.	Salak	-	-	-	-	17
7.	Pisang	-	-	-	757	448

**DISTRIBUSI TOTAL 45283 benih**

IAARD Ministry of Agriculture

Hasil Produksi dan Distribusi Benih UPBS 2015-2019



Pembentukan Kampung Durian di Kabupaten Solok



Peta Sebaran Benih Tanaman Buah Tropika

### PENGEMBANGAN MANGGA DAN BUAH NAGA DI WILAYAH PERBATASAN KEPRI (BBI)

Bimbingan Teknis

2018

Demplot Buah Naga 2020

Penanaman mangga 2018

Demplot mangga 2020

IAARD Ministry of Agriculture | www.litbang.pertanian.go.id

### PENGEMBANGAN PISANG KEPOK TANJUNG DI SELAYO KAB SO

Kelompok Tani serba usaha dan sekitarnya  
 2017 : dibantu 400 batang  
 2020 : menjadi 4000 batang (4 ha)  
 Berkembang menjadi penangkar benih Kepok Tanjung

Panen Perdana Pisang Kepok Tanjung

IAARD Ministry of Agriculture | www.litbang.pertanian.go.id

### PENGEMBANGAN SALAK SARI INTAN DI WILAYAH PERBATASAN KEPRI (2003 sd sekarang)

**Program:**

- Perbanyakan dan pembinaan penangkar benih (sudah tersedia 3.800 pohon induk)
- Perluasan areal tanam
- Pendampingan teknologi

Blok Fondasi salak BBI Bintang

Benih salak dari blok fondasi BBI Bintang

IAARD Ministry of Agriculture | www.litbang.pertanian.go.id

### Pendampingan Pendaftaran Varietas

Pisang Roti Solok Selatan

Pisang Soka Tanah Data

IAARD Ministry of Agriculture | www.litbang.pertanian.go.id

Pembangan Beberapa Buah di Beberapa Daerah

PATEN 2015-2019			
No	Nama Paten	Nomor Paten / Tanggal	Inventor
1.	Kit penanda molekuler SNAP untuk identifikasi genom pisang	IDS000002007 7 Nov 2018	Dr. Agus Sutanto, MSc, dkk
2.	Formulasi pupuk hayati tablet berbahan aktif Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)	IDP000050552 4 April 2018	Ir. Irwan Muas, MP, dkk
3.	Formulasi pupuk hayati granular berbahan aktif Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)	IDP000050551 4 April 2018	Ir. Irwan Muas, MP, dkk
4.	Formulasi pestisida nabati untuk pengendalian penyakit antraknosa	IDS000002568 27 Sept 2019	Dr. Ir. Muryati, MP, dkk
5.	Proses pembuatan manisan rambutan	IDS000002820 15 Januari 2020	Nofiarli, STP, dkk

IAARD Ministry of Agriculture  
www.litbang.pertanian.go.id  
SCIENCE INNOVATION NETWORKS

#### Patent 2015-2019

VARIETAS UNGGUL YANG DIHASILKAN 2015 - 2019					
NO	KOMODITAS	TAHUN	NO	KOMODITAS	TAHUN
<b>A</b>	<b>Mangga</b>		<b>D</b>	<b>Pepaya</b>	
1	Gadung 21	2016	1	Carvita Agrihorti	2015
2	Agrimania	2018	2	Dapina Agrihorti	2017
3	Denarum Agrihorti	2019	<b>E</b>	<b>Semangka</b>	
4	Kraton Agrihorti	2019	1	Serif Saga	2015
<b>B</b>	<b>Durian</b>			<b>Jambu Biji</b>	
1	Nanga	2015	2	Piraweh Ampalu	2015
2	Kromo Banyumas	2015	<b>F</b>	<b>Jambu Air</b>	
3	Tambago Sungai Tarab	2016	1	Lumut Kayen	2018
4	Durian Sambeng	2016	<b>G</b>	<b>Jengkol</b>	
5	MK Hortimat	2018	1	Bareh Pessel	2019
6	Serumbut	2019	2	Lokan Pessel	2019
<b>C</b>	<b>Pisang</b>		<b>H</b>	<b>Petai</b>	
1	Pisang INA 03	2018		Petai aripan 1	2019
2	Pisang kepok keling	2019			
3	Roti - Solsel	2018			
4	Pirama 1	2018			

Varietas Unggulan yang telah didaftarkan sepanjang tahun 2015-2019

## 2. Program Pengembangan Peternakan

Sektor peternakan, Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dengan bentangan alam yang sangat luas menyediakan lahan yang sangat cocok untuk pengembangan peternakan, kemudian curah hujan yang cukup baik sepanjang tahun sangat mendukung ketersediaan bahan pakan untuk ternak. Sejauh ini

Sumatera Barat telah memiliki beberapa kawasan peternakan yang sudah berjalan.

Tersedianya tenaga ahli yang mampu memproduksi pakan, sangat membantu pelaku usaha peternakan dalam menekan biaya operasional untuk penyediaan pakan.

Kemudian daya dukung lain adalah saat ini Sumatera Barat telah memiliki rumah potong hewan sendiri. Beberapa daya dukung tersebut di atas akan mempermudah jalannya Sumatera Barat dalam berupaya bisa menjadi daerah penyuplai daging nasional.

Beberapa aspirasi yang disampaikan:

1. Gubernur Sumatera Barat mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI kepada Provinsi Sumatera Barat terkait hal-hal sebagai berikut:
  - a. Permasalahan ketersediaan pupuk, terutama kelangkaan pupuk bersubsidi yang menjadi utama bagi petani dalam meningkatkan hasil produksi.
  - b. Permasalahan penanganan pascapanen atas komoditas pertanian yang dihasilkan oleh para petani, termasuk fasilitasi pendampingan dan pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil panen untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.
  - c. Permasalahan kepastian harga jual gambir yang merupakan salah satu komoditas unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan nasional.
  - d. Permasalahan sarana irigasi yang sudah sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan, dalam rangka untuk mendukung peningkatan produksi hasil pertanian.
  - e. Provinsi Sumatera Barat menawarkan sekitar 4.700 hektar lahan untuk mendukung Program *Food Estate*.
2. Balitbu Tropika mengarapkan dukungan Komisi IV DPR RI terkait hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peningkatan anggaran pembinaan sumber daya manusia (SDM) di lingkup Kementerian Pertanian serta peningkatan anggaran dalam melaksanakan studi banding dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM.
  - b. Peningkatan anggaran untuk memproduksi benih sebar (benih dari keturunan benih pokok yang memiliki tingkat kemurnian varietas yang

- terjaga), seperti yang diperoleh pada APBN Tahun 2017, mengingat tingginya permintaan benih sebar dari petani, termasuk anggaran untuk meningkatkan jumlah pohon induk dari beberapa varietas yang masih terus dikembangkan.
- c. Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan kebun benih, dimana saat ini anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp800 juta per tahun untuk 6 kebun percobaan dengan areal seluas 218 hektar.
  - d. Peningkatan anggaran program diseminasi, dimana saat ini anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp750 juta per tahun, yang hanya cukup untuk mendukung kegiatan pameran serta pemeliharaan demplot internal, serta tidak mencukupi untuk membuat demplot/demrafm di luar areal kerja Balitbu Tropika.

**Rekomendasi:**

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Balitbu Tropika Aripan Kementerian Pertanian dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan pertanian khususnya jenis hortikultura.
2. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Barat yang telah berhasil mengembangkan produk hasil pertaniannya, khususnya jenis hortikultura, sehingga saat ini Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menjadi salah satu provinsi pengekspor buah-buahan di Indonesia.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan petani di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari permasalahan prasarana dan sarana pertanian, kepastian harga jual produk pertanian, sampai dengan permasalahan penanganan pascapanen atas komoditas pertanian yang dihasilkan oleh para petani, termasuk fasilitasi pendampingan dan pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil panen untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.
4. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengembangan hasil peternakan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk mendukung upaya Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah penghasil daging untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kajian secara holistik dengan menggunakan data yang akurat serta berdasarkan hasil studi banding terkait rencana untuk berpartisipasi dalam melaksanakan *Program Food Estate*.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk meningkatkan anggaran dalam rangka pelaksanaan program penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan pertanian, terutama untuk peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produk hasil perbenihan, serta program diseminasi.

### **C. KUNJUNGAN KE PASAR RAYA PADANG UNTUK MELIHAT KETERSEDIAAN DAN STABILITAS HARGA BAHAN PANGAN JELANG RAMADHAN DAN HARI RAYA KEAGAMANAN/HARI RAYA IDUL FITRI 2021**

Pandemi Covid 19 menyebabkan perekonomian dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia hal ini juga berdampak pada ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Sistem distribusi logistik kebutuhan bahan pangan mengalami gangguan dikarenakan adanya pembatasan aktivitas pada masyarakat, sementara kebutuhan pokok rumah tangga harus tetap terpenuhi.

Saat ini sedang memasuki Bulan Suci Ramadhan, dimana biasanya memasuki bulan Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri harga kebutuhan bahan pokok cenderung naik.

Berdasarkan kunjungan yang dilaksanakan di Pasar Raya Padang, Komisi IV DPR RI memperoleh informasi bahwa harga kebutuhan bahan pangan jelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Keagamaan relatif stabil. Hal ini berdasarkan gambaran harga kebutuhan bahan pangan diantaranya telur ayam negeri Rp1.500,00/butir, telur bebek Rp2.500,00/butir, wortel Rp5.000,00/kg, labu siam Rp4.000,00/kg, bawang putih Rp28.000,00/kg, bawang merah Rp25.000,00/kg, cabai keriting Rp36.000,00/kg-Rp38.000,00/kg, beras Premium Bulog Rp9.950,00/kg, beras Solok Rp15.000,00/kg, dan ketan putih lokal Rp13.000,00/kg.

Stabilitas harga bahan pangan di Kota Padang dan di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, disebabkan ketersediaan bahan pangan yang sudah dapat dipenuhi dari produk pertanian lokal.

## Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi dan menyambut baik terjaganya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Keagamaan/Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk terus melakukan upaya dalam rangka menjaga ketersediaan kestabilan harga bahan pangan secara nasional hingga selesai Hari Raya Keagamaan/Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021.

## D. KUNJUNGAN KE GUDANG BULOG BARU RAWANG TIMUR DI KOTA PADANG



Gambaran stok di Gudang BULOG Sumatera Utara

**BULOG**

**REALISASI PENGADAAN KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT**

(dalam ton)

NO	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG	2020			2021		
		TARGET	REALISASI	% REAL vs TARGET	TARGET	REALISASI *)	% REAL vs TARGET
1	KANWIL SUMBAR	6.280	757	12,07%	3.400	2	0,06%
2	KANGAB BUKIT TINGGI	2.355	3.506	148,87%	5.300	670	12,65%
3	KANGAB SOLOK	7.065	251	4,12%	2.300	29	1,25%
TOTAL		15.700	4.514	29,36%	11.000	701	6,37%

\*) per 6 April 2021 (closing)

Realisasi Stok Pangan Perum BULOG Sumatera Barat



## Penyaluran Tahun 2021 Kantor Wilayah Sumatera Barat



## Posisi Persediaan Beras Kantor Wilayah Sumatera Barat

Beberapa informasi yang diperoleh dari Kunjungan dan Pertemuan di Gudang Bulog Baru Rawang Timur, Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan/stok beras diproyeksikan akan mencukupi kebutuhan jelang Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021.
2. Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat terus melakukan upaya penyerapan beras dan gabah petani.
3. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat akan melakukan operasi pasar.
4. Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat akan terus menjaga stok/ketersediaan beras untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat, termasuk untuk antisipasi pada saat terjadinya bencana.

### Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI menyayangkan adanya isu impor beras yang mengakibatkan turunnya harga beras di tingkat petani. Selanjutnya Komisi IV DPR RI

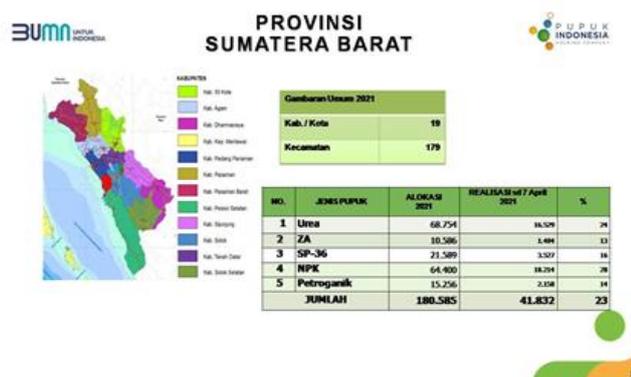
mendorong Perum Bulog untuk terus melakukan upaya penyerapan beras dan gabah serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk terus melakukan upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Ramadhan dan Hari Raya Keagamaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021.
3. Komisi IV DPR RI mendesak Perum Bulog untuk segera melakukan pendistribusian persediaan/stok beras tahun 2018 yang saat ini masih banyak terdapat di Gudang Baru Bulog Rawang Timur serta seluruh Gudang Bulog lainnya, untuk mencegah konsumsi beras kadaluarsa oleh masyarakat.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah serta Perum Bulog untuk melakukan sinkronisasi data riil di lapangan dengan data yang dibangun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta mempergunakan data yang dikeluarkan oleh BPS dimaksud untuk mengambil langkah dan kebijakan yang strategis di bidang pangan dan pertanian.

## E. KUNJUNGAN KE GUDANG PUPUK DI KOTA PADANG



Kapasitas Produksi Pupuk



Gambaran Stok Pupuk Provinsi Sumatera Barat



NO.	JENIS PUPUK	ALOKASI 2021	REALISASI sd 7 April 2021	%
1	Urea	5.539	1.485	25
2	ZA	1.150	157	14
3	SP-36	3.872	632	16
4	NPK	5.245	1.588	30
5	Petroganik	2.836	410	14
<b>JUNLAH</b>		<b>19.042</b>	<b>4.272</b>	<b>22</b>

NO.	GUDANG PENYANGGA	KAPASITAS	ZA	SP-36	PKONDISIA	Pupuk formula baru	Petroganik
1	DC Padang I	25.000	871	3.088	57	3.782	869
2	Painan	1.500	294	148	349	175	171
3	Sijunjung	0	0	0	0	0	0
4	Solok	2.000	204	239	27	200	115
5	Solok Selatan	1.000	134	54	125	0	12
6	Batu Sangkar	1.000	55	57	363	113	106
7	Pasaman Barat	2.000	59	406	4	290	183
8	Pasaman Barat II	0	0	0	0	0	0
9	Pasaman	1.000	86	112	47	100	126
10	Padang Pariaman	2.000	238	229	51	463	251
11	Bukit Tinggi	1.000	30	66	86	38	96
12	Payakumbuh	1.500	231	156	109	180	76
13	Dharmasraya	1.000	181	183	6	225	47
<b>TOTAL</b>		<b>39.000</b>	<b>2.394</b>	<b>4.788</b>	<b>1.224</b>	<b>5.043</b>	<b>2.085</b>

Gambaran Stok Pupuk Kabupaten Solok

Stok Pupuk Bersubsidi Sumatera Barat

Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi s.d. 7 APRIL 2021

NO.	JENIS PUPUK	ALOKASI 2021	REALISASI sd 7 April 2021	%
1	Urea	68.754	38.529	56
2	ZA	18.586	1.480	8
3	SP-36	21.589	3.507	16
4	NPK	64.800	38.234	59
5	Petroganik	15.256	3.038	20
<b>JUNLAH</b>		<b>188.985</b>	<b>41.832</b>	<b>22</b>

Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Beberapa informasi yang diperoleh dari Kunjungan Gudang Pupuk Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Tidak validnya data elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dana e-RDKK dan belum seluruhnya terbit di semua kecamatan.
2. Terdapat kendala pada pengelola kios pelaksana distribusi pupuk bersubsidi, yaitu belum menguasai sistem pelaporan melalui aplikasi elektronik.
3. Banyak petani yang sudah terdaftar dalam RDKK lama, namun belum/tidak terdaftar dalam RDKK baru.
4. Ketersediaan pupuk bersubsidi sebanyak 160.000 ton tidak mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 480.000 ton.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk mencari alternatif penyelesaian permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi seluruh petani yang sudah terdaftar dalam RDKK.

2. Komisi IV DPR RI meminta Dinas Pertanian Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk memperbaiki data RDKK, agar petani yang sudah terdaftar dalam RDKK lama tetap terdaftar dalam RDKK baru.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan yang ketat atas proses pendistribusian pupuk bersubsidi.

#### **F. KUNJUNGAN KE LOKASI PEMBANGUNAN INSINERATOR DI TPA AIE DINGIN DI KOTA PADANG**

*Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mewabah sejak akhir tahun 2019, telah menjadi pandemi global dan menyebabkan berbagai permasalahan, salah satu diantaranya adalah permasalahan kesehatan lingkungan. Permasalahan tersebut terutama mengenai pengelolaan limbah medis. Limbah medis merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang wajib dikelola baik masa normal, terlebih di masa darurat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah terjadi peningkatan limbah medis, baik dalam bentuk cair maupun padat di fasilitas pelayanan kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat.

Protokol kesehatan (prokes) untuk meminimalisasi penyebaran, menciptakan gaya hidup 3M, yakni mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak) nyatanya menimbulkan dampak baru dalam lingkungan, yaitu timbunan sampah medis seperti botol hand sanitizer dan sabun cuci tangan, masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri (APD). Saat area publik di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengalami penurunan jumlah sampah, rumah sakit, hotel/wisma karantina/isolasi dan rumah tangga justru mengalami kenaikan volume timbunan sampah terutama sampah/limbah medis.

Jumlah limbah medis di seluruh dunia termasuk Indonesia selama masa pandemi COVID-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat penambahan jumlah timbulan limbah medis di Indonesia mencapai 30% sejak terjadinya pandemi, namun di lain pihak, kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih sangat terbatas. Banyak pihak yang meragukan kesanggupan Indonesia dalam menangani limbah medis yang jumlahnya meningkat drastis di tengah pandemi

COVID-19. Kapasitas olah fasilitas pelayanan kesehatan dan jasa pengolah limbah medis saat ini masih berada di bawah timbulan limbah. Bila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan limbah medis tersebut justru akan menjadi sumber penularan baru COVID-19.

Jumlah dan Sebaran Limbah B3 dari Fasyankes Tahun 2018

Provinsi	Tempat Tidur	Rata-rata LB3 tempat tidur (kg/hari)*	Jumlah LB3 kg/hari	Total LB3 Provinsi (kg/hari)
<b>Sumatera Barat</b>				
Rumah Sakit				
Kelas A	941.00	1,03	972.99	
Kelas B	940.00	0,63	590.32	
Kelas C	3,159.00	1,38	.58	
Kelas D	645.00	1,38	890.75	
Non Kelas	289.00	1,38	399.11	
Puskesmas	TBA			
Klinik	TBA			
<i>Sub Total LB3 per Provinsi</i>				7.215,75

Sumber: Peta Jalan Pengelolaan Limbah B3 dari fasyankes.

#### Gambaran Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat

Mengatasi permasalahan limbah medis yang dihasilkan selama pandemi COVID-19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19). Dalam surat edaran tersebut fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit berkewajiban: (a) Melakukan penyimpanan limbah infeksius maksimal dua hari; (b) Mengangkut dan atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3 dengan insinerator minimal bersuhu 800 derajat atau *autoclave* yang dilengkapi dengan alat pencacah; (c) Residu hasil pembakaran atau pencacahan dikemas dengan label khusus limbah B3. Meskipun ada beberapa pilihan metode pengolahan limbah medis namun secara umum pengolahan limbah medis di Indonesia dilakukan dengan metode insinerasi.



Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari FASYANKES berada di TPA Aie Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran Program	: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Dan Kualitas Lingkungan dengan berkurangnya Risiko akibat Paparan Limbah B3.
Indikator Kinerja Program	: Jumlah Limbah B3 (Medis dan Non Medis) yang dikelola di Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Kegiatan Prioritas	: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Sasaran Kegiatan	: Menyediakan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terbangunnya Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Program Nasional	: Bidang Kesehatan
Prioritas Nasional	: Lingkungan Sehat
Proyek Prioritas Nasional	: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Proyek K/L	: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Limbah Medis

## Pembangunan Insinerator di TAP Aie Dingin, Kota Padang

Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ini, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan insinerator yang terletak di TPA Aie Dingin, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Diperoleh informasi bahwa pembangunan insinerator yang diharapkan dapat menampung dan mengolah limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi mandiri Pasien COVID-19 di Kota Padang dan sekitarnya ini mengalami permasalahan karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana pembangunan *shelter* (rumah insinerator) pemenang tender (saat ini kontraktor pelaksana sudah masuk dalam *black-list*), sehingga sudah lebih dari 4 (empat) bulan, pembangunan kompleks unit pemusnahan limbah medis ini terpaksa ditunda.

### PENYEDIA:

**PT. KARYA DUTAMANDIRI SEJAHTERA**

#### WAKTU PELAKSANAAN:

11 Agustus s.d 15 Desember (putus kontrak di 17 Desember 2020)

Nilai kontrak Awal: Rp. 2.427.703.927

Nilai Kontrak setelah add: Rp. 2.666.926.000

#### Pembayaran:

Termin I: Rp 800.988.600

Termin II: Rp. 508.814.658 (progress saat putus kontrak : 49,057%)

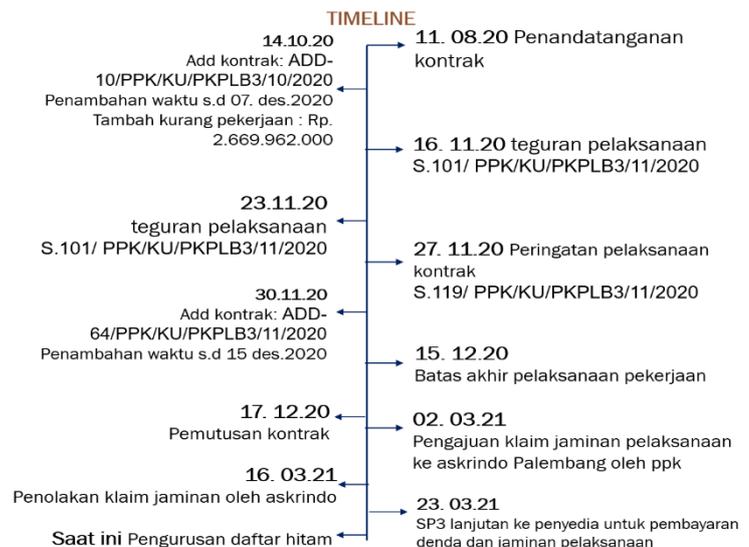
### PENGAWAS:

**CV. GEO ENGINEERING CONSULTAN**

#### WAKTU PELAKSANAAN:

11 Agustus 2020 sampai tanggal 10 November 2020 dan/atau sampai dengan Pembangunan Shelter/Rumah Insinerator di Provinsi Sumatera Barat selesai;

Nilai Kontrak: Rp. 79.926.000



## Wanprestasi Pihak Kontraktor Pelaksana Pembangunan *Shelter* Insinerator

Saat Tim Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke lokasi, disampaikan bahwa pembangunan insinerator yang didanai dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 ini sudah akan dapat dilanjutkan mulai pertengahan bulan April 2021, mengingat sudah dilaksanakannya penandatanganan kontrak antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun berbahaya dengan pihak pelaksana pembangunan shelter pada kompleks unit insinerator di TPA Aie Dingin, dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 3 (tiga) bulan. Diharapkan insinerator mulai dapat beroperasi mulai pertengahan Juli 2021.

Kode Tender	Nama Tender	Tahap	Dokumen
13420291	Penyediaan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengumuman Pascakualifikasi	e-Kontrak
13413291	Penyediaan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bangka Belitung	Pengumuman Pascakualifikasi	e-Kontrak
13412291	Pembangunan Shelter Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat	Upload Dokumen Penawaran	e-Kontrak
13218291	Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Udara Fasilitas Pengolahan Limbah B3 (Insinerator) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan	Upload Dokumen Penawaran	e-Kontrak
13217291	Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Udara Fasilitas Pengolahan Limbah B3 (Insinerator) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	e-Kontrak
13216291	Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Udara Fasilitas Pengolahan Limbah B3 (Insinerator) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	e-Kontrak
13214291	Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Udara Fasilitas Pengolahan Limbah B3 (Insinerator) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Aceh	Masa Sanggah	e-Kontrak

## Lelang Pembangunan Shelter Insinerator di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

### Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan calon kontraktor pelaksana pekerjaan, untuk semua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan, dengan terus melakukan langkah proaktif dan antisipatif atas kendala yang terjadi di lapangan, dalam rangka meningkatkan kinerja berupa penyelesaian kegiatan/program sesuai tata waktu yang telah direncanakan.

## V. KESIMPULAN

- A. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati pada ekosistem Danau Singkarak, terutama terhadap spesies endemik, di antaranya ikan bilih.
- B. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ikan bilih sebagai spesies ikan endemik di Danau Singkarak yang saat ini sudah terancam kepunahannya.
- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengaturan atas pemberian izin usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya bagi pengusaha dan masyarakat di Danau Singkarak dan sekitarnya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem Danau Singkarak.
- D. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan alternatif usaha bagi nelayan di Danau Singkarak sehingga dapat menghentikan penangkapan ikan bilih dalam rangka menjaga kelestarian ikan bilih sebagai spesies endemik yang saat ini hampir punah.
- E. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penanganan sampah dan limbah yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada ekosistem Danau Singkarak.
- F. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan petani di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari permasalahan prasarana dan sarana pertanian, kepastian harga jual produk pertanian, sampai dengan permasalahan penanganan pascapanen atas komoditas pertanian yang dihasilkan oleh para petani, termasuk fasilitasi pendampingan dan pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan hasil panen untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.
- G. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengembangan hasil peternakan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI

- mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk mendukung upaya Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah penghasil daging untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.
- H. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kajian secara holistik dengan menggunakan data yang akurat serta berdasarkan hasil studi banding terkait rencana untuk berpartisipasi dalam melaksanakan *Program Food Estate*.
- I. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk meningkatkan anggaran dalam rangka pelaksanaan program penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan pertanian, terutama untuk peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produk hasil perbenihan, serta program diseminasi.
- J. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk terus melakukan upaya dalam rangka menjaga ketersediaan kestabilan harga bahan pangan secara nasional hingga selesai Hari Raya Keagamaan/Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021.
- K. Komisi IV DPR RI menyayangkan adanya isu impor beras yang mengakibatkan turunnya harga beras di tingkat petani. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk terus melakukan upaya penyerapan beras dan gabah serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
- L. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk terus melakukan upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Ramadhan dan Hari Raya Keagamaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021.
- M. Komisi IV DPR RI mendesak Perum Bulog untuk segera melakukan pendistribusian persediaan/stok beras tahun 2018 yang saat ini masih banyak terdapat di Gudang Baru Bulog Rawang Timur serta seluruh Gudang Bulog lainnya, untuk mencegah konsumsi beras kadaluarsa oleh masyarakat.
- N. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah serta Perum Bulog untuk melakukan sinkronisasi data riil di lapangan dengan data yang dibangun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta mempergunakan data yang dikeluarkan oleh BPS dimaksud untuk mengambil langkah dan kebijakan yang strategis di bidang pangan dan pertanian.
- O. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* untuk mencari alternatif penyelesaian permasalahan ketersediaan

pupuk bersubsidi bagi seluruh petani yang sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

- P. Komisi IV DPR RI meminta Dinas Pertanian Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk memperbaiki data RDKK, agar petani yang sudah terdaftar dalam RDKK lama tetap terdaftar dalam RDKK baru.
- Q. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan yang ketat atas proses pendistribusian pupuk bersubsidi.
- R. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan calon kontraktor pelaksana pekerjaan, untuk semua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- S. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan, dengan terus melakukan langkah proaktif dan antisipatif atas kendala yang terjadi di lapangan, dalam rangka meningkatkan kinerja berupa penyelesaian kegiatan/program sesuai tata waktu yang telah direncanakan.

## VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 April 2021

Ketua Tim,

Ttd.

**Anggia Erma Rini, M.K.M.**

A-41

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI  
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021  
Provinsi Sumatera Barat

## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32628/t/Komisi+IV+Minta+Ekosistem+Ikan+Bilih+Dip](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32628/t/Komisi+IV+Minta+Ekosistem+Ikan+Bilih+Dip<ulihkan)

<http://dpp.solokkab.go.id/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-dan-kkp-ri-di-singkarak10-april-2021>

<https://www.antaranews.com/berita/2100890/anggota-komisi-iv-dpr-ri-minta-pemerintah-dirikan-bilih-center>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/426114/untuk-kelestarian-populasi-ikan-bilih-di-danau-singkarak-anggota-komisi-iv-dpr-ri-minta-pemerintah-dirikan-ini>

<https://liputan.co.id/2021/04/ke-danau-singkarak-komisi-iv-dpr-ikan-bilih-mulai-punah/>

<https://kkp.go.id/artikel/29459-kkp-sepakat-bersama-pemerintah-daerah-sumatera-barat-membangun-national-bilih-center-di-danau-singkarak>

<http://pangannews.id/berita/1618196267/cegah-kepunahan-ikan-di-danau-singkarak-kkp-salurkan-bantuan>

<https://fraksi.pks.id/2021/04/10/politisi-pks-minta-pemerintah-bantu-petani-buah-dengan-pendampingan-dan-akses-pasar/>

<http://birohumas.sumbarprov.go.id/details/news/149>

<https://www.binews.id/berita/4710/kunjungi-balitbu-bersama-wagub-mentan-sebut-pertanian-di-sumbar-harus-tampilkan-inovasi-terbaik.html>

<http://birohumas.sumbarprov.go.id/details/news/171>

[https://www.youtube.com/watch?v=4I7\\_VMvrevU](https://www.youtube.com/watch?v=4I7_VMvrevU)

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32630/t/Komisi+IV+Pastikan+Stok+Beras+Sumbar+Aman+saat+Hari+Raya>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/425542/komisi-iv-dpr-ri-tinjau-ketersediaan-beras-di-gudang-bulog-sumbar>

<https://www.merdeka.com/uang/ketua-komisi-iv-dpr-duga-ada-oknum-distribusi-pupuk-subsidi-di-pemerintahan.html>

